KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Usulkan Tunjangan
Tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Usulkan Tunjangan

DPR mengusulkan fasilitas rumah dinas untuk mereka diganti tunjangan perumahan. Selain belum disetujui semua fraksi, usulan itu juga berpotensi memboroskan keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS – DPR serius mengusulkan penggantian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR jadi tunjangan perumahan. Usulan itu sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, dan kini menunggu persetujuan.

"Jika disetujui, alokasi untuk tunjangan perumahan itu akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Sebelumnya, wacana penggantian fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulan dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo akhir April lalu. Namun, saat itu wacana ini dalam tahap dibicarakan dengan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.

Menurut Indra, usulan penggantian itu diajukan karena banyak rumah dinas yang tidak digunakan anggota DPR. Sementara biaya pemeliharaan rumah itu cukup tinggi. Alasan senada pernah dikemukakan Bambang.

"Sekitar lima tahun lalu, rumah dinas direnovasi. Namun, karena anggaran terbatas, renovasi tidak total," ujar Indra.

Terkait hal itu, berdasarkan hasil kajian bersama Setjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, akan lebih efisien jika anggota DPR cukup menerima tunjangan perumahan. Kemudian, anggota DPR sendiri yang lalu menentukan tempat tinggalnya selama menjabat anggota DPR.

Adapun mengenai besaran tunjangan itu, Indra mengatakan, Kemenkeu yang menentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Namun, diusulkan agar besar tunjangan itu mengikuti biaya sewa apartemen dengan tiga kamar tidur yang ada di sekitar Kompleks Parlemen, yaitu di kawasan Senayan, Jakarta.

Jika Kemenkeu menyetujui usulan itu, aset rumah dinas bagi para anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata dan Ulujami akan dikembalikan ke pemerintah. "Terserah kepada pemerintah akan digunakan untuk apa," tambah Indra.

Ketua BURT DPR dari Fraksi Partai Golkar Anthon Sihombing membenarkan usulan itu. Namun, dia enggan menyebutkan besar tunjangan perumahan yang diusulkan dengan alasan masih tahap pengusulan.

Menolak

Namun, tidak semua fraksi setuju dengan rencana itu. Salah satunya Fraksi Partai Nasdem. "Aset negara, termasuk rumah dinas, harus dioptimalkan penggunaannya. Jika usulan disetujui, ratusan rumah dinas itu untuk apa?" ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate.

Lagi pula, lanjut Johnny, dengan tinggal bersama di satu kompleks, banyak manfaat yang bisa diperoleh anggota DPR. Hal itu antara lain memudahkan anggota DPR bertemu untuk rapat, berkegiatan bersama, atau sekadar bersilaturahim. Dengan demikian, relasi yang terjalin di antara anggota DPR lebih kuat.

Dia pun mempertanyakan masuknya usulan itu ke Kemenkeu sebelum dibahas bersama dengan pimpinan fraksi ataupun anggota DPR lainnya. "Belum ada pembicaraan dengan fraksi," tambahnya.

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus curiga orientasi DPR di balik usulan itu adalah lebih pada upaya mencari tambahan penghasilan lewat tunjangan perumahan. "Tidak ada jaminan jika tunjangan disetujui akan dipakai untuk menyewa rumah. Ini karena banyak anggota DPR yang sudah punya rumah pribadi di Jakarta," katanya.

Selain itu, rumah dinas anggota DPR, menurut dia, masih dalam kondisi bagus.

Usulan penggantian dari rumah dinas ke tunjangan perumahan ini, lanjut Lucius, akhirnya hanya semakin menampakkan wajah DPR yang boros. Usulan itu juga bertentangan dengan sikap sejumlah anggota DPR yang menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini masih sulit. (APA)